

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar belakang Penelitian**

Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat mempengaruhi perubahan-perubahan hampir dalam seluruh aspek kehidupan termasuk dalam tatanan pengelolaan pemerintahan.

Dalam kondisi abad di abad 21 ini, di seluruh belahan bumi bahwa tatanan manajemen pemerintahan yang sentralistik sudah tidak zamannya lagi, baik di negara maju maupun berkembang termasuk Indonesia. Sistem pemerintahan negara kita mengalami perubahan yang drastis dan fundamental yaitu dari sentralisasi menjadi desentralisasi.

Sentralisasi menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang "Pemerintahan Daerah" dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang "Pembagian Urusan" menyebutkan bahwa urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat dan urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan. Urusan sentralisasi saat ini hanya tinggal urusan-urusan yang bersifat terpusat yaitu politik luar negeri, pertahanan, keamanan, politik, hukum, moneter dan fiskal nasional serta agama.

Sentralisasi pada masa lalu adalah strategi pemerintah pusat yang memusatkan seluruh kewenangan atas segala urusan yang menyangkut pemerintahan oleh pemerintah pusat. Sentralisasi merupakan kontrol terhadap

kekuasaan dan lokasi oleh pemerintah pusat. Sentralisasi banyak digunakan pada pemerintahan lama di Indonesia sebelum adanya otonomi daerah, terutama pada zaman Kerajaan Pemerintah Kolonial Belanda maupun di zaman kemerdekaan.

Sedangkan pemerintahan yang desentralisasi menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang “Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah” adalah penyerahan urusan pemerintah dari pusat kepada daerah. Pelimpahan wewenang kepada pemerintahan daerah, semata-mata untuk mencapai suatu pemerintahan yang efisien. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang “Pemerintahan Daerah” disebutkan penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom adalah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan adanya otonomi daerah terdapat keuntungan bagi pemerintah daerah antara lain :

- 1) Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dalam mencapai kesejahteraan masyarakat.
- 2) Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat (publik) untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.
- 3) Menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah.

Secara pendekatan manajemen pada hakekatnya otonomi daerah adalah pendelegasian wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Semakin besar pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah akan makin meningkatkan *responsibility* karakteristik dari orang/individu,

agar lebih inovatif, etos kerja yang tinggi yang pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas yang tinggi.

Perubahan sistem pemerintahan dari sistem terpusat menjadi sistem otonomi telah memberi dampak yang besar pada penyelenggaraan pemerintahan dan ruang lingkup kerja pada umumnya sehingga memberi dampak juga pada perubahan pengaturan sistem keuangan pemerintah daerah. Otonomi daerah mewajibkan pemerintahan daerah untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat secara demokratis, merata, adil dan berkesinambungan. Kewajiban itu bisa dipenuhi apabila pemerintah daerah mampu mengelola potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya keuangan secara optimal dengan menerapkan prinsip-prinsip “*good governance*” yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas.

Dalam implementasinya ternyata banyak pemerintah daerah menghadapi berbagai permasalahan yaitu :

1) Permasalahan tingginya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Permasalahan yang sering dihadapi oleh para penyelenggara pemerintah daerah adalah seringnya terlibat permasalahan KKN. Dewasa ini sering terdengar di media masa tentang kepala daerah, anggota dewan, pengusaha maupun pejabat daerah yang terlibat masalah korupsi. Korupsi saat ini sudah melibatkan banyak orang di segala lini dan seluruh sistem kehidupan. Jumlah kepala daerah yang terlibat masalah hukum sudah mencapai  $\pm 300$  orang, ribuan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) maupun ribuan penyelenggaraan negara.

2) Permasalahan belum maksimalnya kinerja.

Dalam melaksanakan urusannya, banyak penyelenggara pemerintah daerah mengalami permasalahan yaitu tidak maksimalnya kinerja. Penilaian kinerja yang disusun setiap akhir tahun sering tidak mendapat nilai yang memuaskan. Setiap tahun seluruh instansi pemerintah daerah akan dilakukan evaluasi kemudian diberikan penilaian oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) tentang kinerjanya. Penilaian kinerja akan dievaluasi sesuai dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu juga dievaluasi sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal yang telah disusun oleh Kementerian Teknis.

3) Permasalahan daya serap anggaran yang rendah.

Karena seringnya pejabat daerah yang bermasalah hukum, hal tersebut menimbulkan keengganan dari pelaksana kegiatan untuk melaksanakan tupoksinya. Para pejabat publik gamang untuk melaksanakan kegiatannya, banyak dari pejabat publik khawatir dan was-was akhirnya cenderung mencari aman dengan tidak melaksanakan kegiatannya. Hal tersebut berdampak pada rendahnya daya serap anggaran. Realisasi anggaran yang banyak diserap oleh para penyelenggara pemerintah daerah adalah belanja yang bersifat intern yaitu belanja pegawai dan barang dan jasa sedangkan belanja modal serta untuk pembangunan relatif rendah. Saat ini terdapat kecenderungan berupa keengganan para penyelenggara pemerintah daerah untuk tidak merealisasikan anggarannya, karena khawatir akan bermasalah dengan aparat hukum.

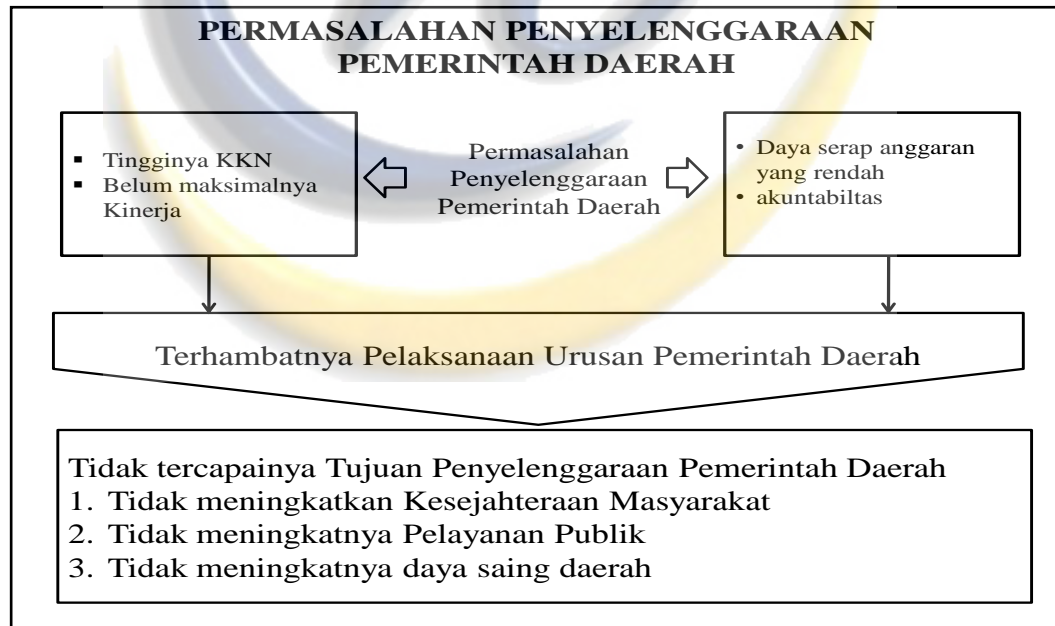
#### 4) Permasalahan Akuntabilitas.

Untuk melaksanakan kegiatannya, pemerintah daerah memerlukan dana yang tidak sedikit. Setiap penggunaan dana tersebut harus dicatat, dilaporkan dalam laporan keuangan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Pertanggung jawaban tersebut setiap tahun akan diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Dari hasil pemeriksaan BPK diketahui ternyata banyak penyelenggara pemerintah daerah yang pertanggungjawaban laporan keuangannya belum memperoleh hasil yang maksimal.

Seluruh permasalahan di atas dapat digambarkan sebagai berikut :

**Gambar 1.1**  
**Permasalahan Oleh Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**



Sumber Data : Dadang Suwanda (Strategi Mendapatkan Opini WTP Laporan Keuangan Pemda, 2013)

Adapun kondisi terkini tentang perolehan Opini hasil pemeriksaan BPK dapat kita ketahui dari Buku Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK Semester II tahun 2013 untuk tahun buku 2013 yang menyebutkan :

“Jumlah pemerintah Provinsi se-Indonesia yang telah memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) adalah sebanyak 6 Provinsi (18 %) dari 33 Provinsi, sedangkan untuk pemerintah kabupaten adalah sebanyak 16 kabupaten (4%) dari 394 kabupaten dan 21 pemerintah kota (13%) dari 85 pemerintahan kota”.

Dengan kata lain perolehan Opini WTP atas laporan keuangan pemerintah daerah tidak menggembirakan, demikian juga untuk pemerintah daerah di provinsi Jawa Barat. Jumlah pemerintah daerah di provinsi Jawa Barat adalah sebanyak 27 yang terdiri dari 1 (satu) pemerintah Provinsi, 17 pemerintah kabupaten dan 9 pemerintahan kota. Sampai dengan semester I tahun 2014 pemerintah daerah di Provinsi Jawa Barat yang mendapat Opini WTP baru berjumlah 3 (tiga) yaitu Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Majalengka Pemerintah Kota Depok, Pemerintah Kota Banjar dan Kota Cimahi,.

Sebagai ilustrasi perolehan Opini BPK di Provinsi Jawa Barat dapat digambarkan sebagai berikut :

**Tabel 1.1.**  
**Perkembangan Opini LKPD Tahun 2008-2013<sup>\*)</sup>**

No	Entitas Pemerintah Daerah	Opini Tahun					
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	Prov. Jawa Barat	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
2	Kab. Bandung	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
3	Kab. Bandung Barat	TMP	TMP	TMP	WDP	WDP	WDP
4	Kab. Bekasi	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
5	Kab. Bogor	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
6	Kab. Ciamis	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP
7	Kab. Cianjur	WDP	TMP	WDP	WDP	WDP	WDP
8	Kab. Cirebon	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP

9	Kab. Garut	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
10	Kab. Indramayu	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	TMP
11	Kab. Karawang	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
12	Kab. Kuningan	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
13	Kab. Majalengka	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP
14	Kab. Purwakarta	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
15	Kab. Subang	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
16	Kab. Sukabumi	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
17	Kab. Sumedang	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
18	Kab. Tasikmalaya	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
19	Kota Bandung	WDP	TMP	WDP	WDP	WDP	WDP
20	Kota Banjar	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
21	Kota Bekasi	WDP	TMP	WDP	WDP	WDP	WDP
22	Kota Bogor	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
23	Kota Cimahi	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP
24	Kota Cirebon	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
25	Kota Depok	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
26	Kota Sukabumi	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
27	Kota Tasikmalaya	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP

\*) Data sampai dengan semester I 2014

Sumber Data : Laporan BPK yang dimodifikasi penulis (2014)

Laporan keuangan yang baik tidak hanya berujung kepada tercapainya Opini WTP, tetapi juga dapat menjadi instrumen dalam pengambilan keputusan yang tepat. Dengan tidak didapatnya Opini WTP, hal tersebut menimbulkan masalah sendiri bagi penyelenggara pemerintah daerah yaitu tidak dapat melakukan keputusan yang tepat serta tidak akuntabilitasnya laporan keuangan pemerintah daerah.

Pemerintah melalui Perencanaan Nasionalnya telah menargetkan bahwa untuk laporan keuangan pemerintah daerah tahun buku 2014 yang akan dicapai pada tahun 2015 target pemerintah daerah yang harus mendapat Opini WTP pemeriksaan dari BPK adalah sebanyak 60%.

Dengan keberhasilan memperoleh Opini WTP tersebut, juga akan mempengaruhi keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah terutama di bidang keuangan daerah. Keberhasilan melaksanakan penyelenggaraan pemerintah daerah merupakan tuntutan dan harapan masyarakat agar dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Selain itu pemerintah juga merencanakan akan memberikan *reward* bagi penyelenggara pemerintah daerah dengan memberikan insentif bagi pemerintah daerah yang mendapatkan Opini WTP atas laporan keuangannya yaitu berupa pemberian insentif uang sebesar ±30 milyar, bagi pemerintah daerah yang mendapatkan Opini WTP atas pertanggungjawaban laporan keuangannya.

Di sisi lain pemerintah juga merencanakan akan memberikan *punishment* berupa penundaan Dana Perimbangan yaitu dana DAU (Dana Alokasi Umum) sebesar 20% serta dilarangnya kepala daerah yang tidak mendapat Opini WTP atas laporan keuangannya untuk maju dalam mengikuti pemilihan kepala daerah periode berikutnya.

Tidak didapatnya Opini WTP hasil pemeriksaan BPK oleh pemerintah daerah secara umum disebabkan belum berkualitasnya laporan keuangan pemerintah daerah,

Dari Laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2013 BPK menyebutkan permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan keuangan daerah antara lain meliputi :

- 1) Sistem Pengendalian Intern belum optimal.
- 2) Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD yang belum sepenuhnya didasarkan pada identifikasi dan analisis risiko.
- 3) Pengelolaan aset yang belum tertib yaitu pencatatan dan pelaporan aset belum sepenuhnya sesuai ketentuan.
- 4) Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah (SIMDA BMD) yang belum sepenuhnya dimanfaatkan.
- 5) *Standard Operating Procedure* (SOP) pengelolaan aset pada SKPD belum efektif diterapkan.
- 6) Kompetensi SDM belum sepenuhnya memadai.
- 7) Tindak lanjut temuan belum dilaksanakan secara optimal oleh SKPD, ditandai adanya temuan yang berulang dan hanya berganti *locus*.

Majalah Akuntansi Indonesia edisi Nomor 18 Bulan Juli 2009 menyebutkan bahwa dalam rangka membangun Sistem Akuntansi Instansi (SAI), sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59 Tahun 2005, usaha yang perlu diupayakan dan dikondisikan oleh semua instansi pusat dan daerah adalah, adanya :

- 1) Komitmen pimpinan (*management commitment*) yang kuat dari setiap pimpinan unit akuntansi pada setiap tingkatan,
- 2) Perangkat komputer dan printer (*hardware*) yang diperlukan untuk dapat berfungsinya perangkat tersebut pada setiap tingkatan unit akuntansi,

- 3) Sumber daya manusia (*brainware*) yang akan menyelenggarakan SAI pada setiap tingkatan unit akuntansi keuangan/barang dituntut untuk memiliki kemampuan yang memadai dalam hal akuntansi dan pengoperasian komputer,
- 4) Anggaran (*budget*) yang cukup untuk menyelenggarakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) pada setiap tingkatan unit akuntansi.
- 5) Reviu yang memadai dan berkualitas oleh aparat pengawasan internal (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal/Inspektorat Utama pada Kementerian dan Lembaga Negara, Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota) yang didukung Staf Internal Auditor dengan memiliki kompetensi di bidang akuntansi.

Dari hasil penelitian sebelumnya diketahui bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan yang telah dilakukan oleh penulis terdahulu yaitu :

- 1) Nugraheni dan Subaweh (2008) dalam penelitiannya menyimpulkan adanya pengaruh penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), pengetahuan pengelola Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran-Eselon I (UAPPA-EI) dan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang (UAPPB) yang memadai dan ketersediaan sarana dan prasarana terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional.
- 2) Mustafa, *dkk* (2010) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) tidak berpengaruh terhadap keterandalan laporan keuangan, namun pengendalian intern akuntansi dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap keterandalan, hal tersebut .

pelaporan keuangan. Keterandalan pelaporan keuangan tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan, sementara kapasitas SDM dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

Kapasitas SDM berpengaruh terhadap keterandalan, hal tersebut disebabkan karena memang karakteristik SDM di Kota Kendari yang masih memiliki kapasitas yang rendah dan taraf pendidikan yang masih relatif rendah khususnya dalam bidang akuntansi. Keterandalan pelaporan keuangan tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu bisa disebabkan oleh upaya untuk memenuhi sebuah kriteria penyajian pelaporan keuangan yang andal, diperlukan berbagai upaya baik yang bersifat material maupun non material, yang mengakibatkan waktu yang diperlukan untuk mempersiapkan sebuah sistem pelaporan keuangan yang andal akan semakin lama.

- 3) Arfianti (2011) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif signifikan terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengawasan keuangan daerah tidak berpengaruh. Disamping itu, kualitas sumber daya manusia dan pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif signifikan terhadap ketepatwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan pengawasan keuangan daerah tidak berpengaruh.
- 4) Pada tahun yang sama, Rosalin (2011) memberikan kesimpulan yang inkonsisten dengan Arfianti (2011) dan Mustafa, dkk (2010), dimana Rosalin

(2011) menemukan pemanfaatan teknologi, pengendalian intern akuntansi, dan komitmen organisasi berpengaruh signifikan terhadap keandalan pelaporan keuangan. Sedangkan kualitas sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap keandalan pelaporan keuangan. Pada pengujian kedua didapatkan hasil bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan komitmen organisasi berpengaruh signifikan terhadap *timeliness* pelaporan keuangan. Sedangkan kualitas sumber daya manusia dan pengendalian intern akuntansi tidak berpengaruh signifikan terhadap *timeliness* pelaporan keuangan.

- 5) Sukmaningrum (2012) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan kompetensi Sumber Daya Manusia tidak berpengaruh. Kompetensi sumber daya manusia tidak signifikan dikarenakan kurangnya sumber daya manusia itu sendiri dari segi kualitas dan kuantitas. Faktor eksternal tidak dapat digunakan sebagai hubungan antara kompetensi sumber daya manusia dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas informasi laporan keuangan. Faktor eksternal berperan sebagai variabel bebas dan tidak berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan, hal ini dikarenakan dinamika perubahan sektor pemerintahan tidak diakomodasi oleh kesiapan sumber daya manusia dan tidak proaktif terhadap tekanan-tekanan publik.

Berdasarkan fenomena-fenomena permasalahan tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“Faktor-Faktor Yang**

**Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Untuk Mendapatkan Opini WTP Dari BPK (Survey pada Pemerintah Daerah Di Lingkungan Badan Koordinasi Pemerintahan Dan Pembangunan Wilayah IV Provinsi Jawa Barat)”.**

Penelitian dilakukan pada kantor pemerintah daerah di Provinsi Jawa Barat khususnya di Lingkungan Badan Koordinasi Pemerintahan Dan Pembangunan Wilayah IV Provinsi Jawa Barat yang diwajibkan menyusun laporan keuangan pemerintah daerah yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat diterima secara umum, didasari pada prinsip-prinsip akuntansi, sistem dan prosedur akuntansi. Adapun pertimbangan lainnya adalah didasarkan pada letak geografis, jumlah kabupaten dan kota yang relatif banyak yaitu 10 kabupaten dan kota sehingga dianggap dapat mewakili untuk dijadikan penelitian yang mewakili provinsi Jawa Barat.

**1.2. Identifikasi Masalah**

Dari uraian di atas disimpulkan identifikasi permasalahan yang diambil adalah :

- 1) Seberapa besar Penerapan SAP, Kualitas SDM, Implementasi Sistem Pengendalian Intern, Komitmen Organisasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
- 2) Faktor apa yang paling dominan mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
- 3) Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi laporan keuangan pemerintah daerah dalam mendapatkan Opini WTP dari BPK ?

- 4) Strategi apa yang dapat dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

## **2.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian identifikasi masalah tersebut, dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah :

- 1) Seberapa Besar Pengaruh Penerapan SAP, Kualitas SDM, Implementasi Sistem Pengendalian Intern, Komitmen Organisasi Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Baik Secara Simultan Maupun Secara Parsial Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Provinsi Jawa Barat Untuk Mendapatkan Opini WTP Khususnya Pada Pemerintah Daerah Di Lingkungan Badan Koordinasi Pemerintahan Dan Pembangunan Wilayah IV Provinsi Jawa Barat”.
- 2) Pengaruh laporan keuangan pemerintah daerah dalam mendapatkan Opini WTP dari BPK.

## **1.3. Maksud dan Tujuan**

### **1.3.1 Maksud Penelitian**

Maksud penelitian ini adalah.

- 1) Bagi pemerintah daerah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pihak-pihak yang terkait di pemerintah daerah, sehingga lebih mudah mencari alternatif untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas laporan keuangan khususnya dalam memperbaiki kualitas laporan keuangan pemerintah daerah untuk memperoleh Opini WTP.

- 2) Bagi peneliti lain, penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan untuk menyempurnakan penelitian-penelitian sejenis berikutnya.
- 3) Bagi ilmu pengetahuan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan Ilmu Akuntansi di bidang pengelolaan keuangan daerah khususnya dalam meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- 4) Bagi Penulis, penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar Magister Akuntansi Program Pasca Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama.

### **1.3.2 Tujuan penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Faktor Penerapan SAP, Kualitas SDM, Implementasi Sistem Pengendalian Intern, Komitmen Pimpinan dan Organisasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Barat (Survey pada Pemerintah Daerah Di Lingkungan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV Provinsi Jawa Barat) khususnya keterkaitan untuk mendapatkan Opini WTP baik secara simultan maupun secara parsial.

### **1.4 Kegunaan Penelitian.**

Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini antara lain :

- 1) Bagi peneliti, diharapkan dapat menambah pengalaman, pemahaman dan kemampuan intelektual tentang pengaruh faktor penerapan SAP, kualitas

SDM, implementasi sistem pengendalian intern, komitmen organisasi, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan dalam memperoleh Opini WTP.

- 2) Bagi pemerintah daerah khususnya pemerintah daerah di Provinsi Jawa Barat yaitu sebagai bahan masukan didalam menyikapi permasalahan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam rangka mendapatkan/mempertahankan Opini WTP.
- 3) Menambah literatur dan acuan bagi penelitian di bidang akuntansi pemerintahan, terutama yang ingin melakukan penelitian lanjutan mengenai laporan keuangan pemerintah daerah.
- 4) Untuk bahan masukan dan bahan perbandingan bagi setiap orang yang ingin menambah wawasan mengenai laporan keuangan pemerintah daerah dan kaitannya dengan Opini Hasil Pemeriksaan Keuangan oleh BPK.